

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Primer yang diperoleh menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebarakan secara langsung kepada responden di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung. Penyebaran kuesioner ini dilakukan pada tanggal 10 April 2018 sampai dengan 10 Mei 2018.

Jumlah kuesioner menunjukkan jumlah sampel yang memenuhi kriteria penelitian, sampel yang dijadikan objek penelitian ini adalah Pegawai Pajak seksi pemeriksaan dan seksi penagihan KPP Pratama Teluk Betung. Dari populasi yang berjumlah 35 orang yang berprofesi sebagai pemeriksa fungsional dan penagih pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini (KPP Pratama Teluk Betung 2018).

Tabel 4.1 Sampel Penelitian

NO	Keterangan Kuesioner	Jumlah kuesioner
1	Kuesioner yang dikirim	35
2	Kuesioner yang kembali	30
3	Kuesioner yang tidak bisa kembali	5
4	Presentasi pengambilan	85,7%
5	Kuesioner yang tidak dapat digunakan	0
6	Kuesioner yang bisa diolah	30
7	Presentasi kuesioner yang diolah	85,7%

Sumber : data primer diolah, 2018

Fokus penyebaran kuesioner ini adalah di KPP Pratama Teluk Betung, yang disebarakan sebanyak 35 kuesioner. Terdapat 5 kuesioner yang tidak dapat

kembali dikarenakan pemeriksa fungsional sedang bertugas diluar kota. Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 30. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 10 April 2018 sampai dengan 10 Mei 2018. Alat ukur dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner skala *likert* yaitu skala yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban dengan uraian sebagai berikut :

No.	Jenis Jawaban Responden	Bobot
1	Sangat setuju (SS)	5 Poin
2	Setuju (S)	4 Poin
3	Ragu-ragu (RR)	3 Poin
4	Tidak Setuju (TS)	2 Poin
5	Sangat tidak Setuju (STS)	1 Poin

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung merupakan kantor dinas luar pajak tingkat 1 Teluk Betung yang berada dibawah wewenang Kantor Inspeksi Keuangan Palembang. Pada tanggal 13 Januari 1964 secara resmi statusnya dinaikkan menjadi kantor Inspeksi Keuangan Palembang yang membawahi Kantor Dinas Luar Tingkat Teluk Betung. Seiring dengan perubahan status keresidenan Lampung menjadi Provinsi Lampung, dan pada tahun 1966 dilakukan perubahan menjadi Kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung.

Sejalan dengan perubahan sistem perpajakan nasional di tahun 1984 dimana prinsip pemunguta pajak dalam Undang-undang perpajakan yang semula *official assesment* yang dirubah menjadi *self assesment*. Maka pada tanggal 1 april 1989 Kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung.

Sebelum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung terletak di Jl. Dr. Susilo No.19 Teluk Betung Bandar Lampung. Tetapi sejak tanggal 9 september 2008 Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung dipecah menjadi 4, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Salah satunya di daerah Teluk Betung tepatnya di Jl.P. Emir M,Noer No.5A yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung sekarang beralamat di jalan Pangeran Emir M Noer No. 5 A Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Telukbetung Utara Bandar Lampung Lt. 1-3, satu gedung dengan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Adapun tugas dan wewenang struktur organisasi pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung adalah sebagai berikut :

1) Sub Bagian Umum

Pada Sub Bagian Umum memiliki 4 tugas adalah sebagai berikut:

a. Kepegawaian

Tugas-tugasnya adalah:

- Memproses permintaan Pengujian Kesehatan Pegawai
- Penerbitan surat izin melanjutkan pendidikan diluar kedinasan (S1)
- Pengajuan usul peserta pendidikan di luar negeri
- Membuat laporan perkawinan pertama pegawai
- Pengajuan usul permohonan pensiun janda/duda
- Pengajuan uang makan PNS
- Memproses permintaan dan pembayaran lembur pegawai
- Permohonan Kartu Tanda PesertaAsuransi dan Taspen

b. PDG (Pembuat Daftar Gaji)

Tugas-tugasnya adalah:

- Penyusunan rencana kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAKL) pada Kantor Pelayanan Pajak.

- Pengurusan gaji.

c. Sekertaris

Tugas-tugasnya adalah:

- Penerimaan dan penyampaian dokumen di KPP Pratama Teluk Betung.
- Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk.
- Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa.

d. Bendahara

Tugas-tugasnya adalah:

- Mekanisme pembayaran anggaran belanja (Pembayaran Melalui Uang Persediaan).
- Pelaksanaan Pembayaran Tagihan melalui Mekanisme Langsung kepada rekanan
- Penyusunan Laporan/Daftar Realisasi Anggaran Belanja.
- Penyusunan Laporan SAKPA (Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran) tingkat satuan kerja unit/Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
- Pelaksanaan Penutupan Buku Umum.

2) Seksi Pelayanan

- a. Tata cara penatausahaan surat, dokumen, dan laporan wajib pada tempat pelayanan terpadu sebagai berikut:
- Memilih SPT Tahunan atau SSP yang akan diurutkan.
 - Memisahkan SPT Tahunan atau SSP dengan kode wilayah setempat.
 - Memisahkan SPT Tahunan atau SSP sesuai dengan urutan besar kecilnya NPWP.

b. Tata Cara Penulisan Legalisir SKB

- Memilih lembar legalisir SKB yang akan dituliskan pada buku register, legalisir SKB.
- Menuliskan nomor surat, jenis barang yang diproduksi, serta nama perusahaan.

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tugas-tugas dalam pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk PDI:

1. Mengecek Lembar SPT masa atau SPT tahunan yang akan direkam.
2. Merekam SPT masa PPN pada lembar formulir 1107 dan SPT tahunan OP (Orang Pribadi) pada formulir 1770.
3. Menuliskan pada lembar disposisi tanggal SPT Tahunan, SPT Masa PPH pasal 23/26, SPT masa PPh pasal 21 yang telah direkam.

4) Seksi Penagihan

Tugas-tugas dalam penatausahaan dan pemrosesan dokumen masuk di seksi penagihan:

1. Mengecek lembar surat penagihan yang akan diurutkan sesuai dengan besar kecilnya nomor NPWP. Setelah diurutkan sesuai dengan nomor NPWP kemudian diurutkan kembali sesuai dengan nama perusahaan.

5) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Tugas-tugas dalam penanganan Wajib Pajak Non efektif (NE) secara jabatan di seksi pengawasan dan konsultasi:

1. Mengecek login kedalam sistem (SIPMOD) menggunakan user AR
2. Memilih menu aplikasi administrasi dan sub menu penanganan WP (Wajib Pajak Non Efektif) pada bagian WP Non Efektif secara jabatan.

3. Menginput atau merekam data Wajib Pajak yang akan direkam berdasarkan data yang telah dibentuk masing-masing AR kedalam berita acara penelitian Wajib Pajak dan menyimpannya.

6) Seksi Ekstensifikasi

Tugas-tugas kerja pada seksi ekstensifikasi yang berkaitan dengan PBB:

1. Membuat register PBB yang selanjutnya dikirim ke seksi PDI
2. Pemrosesan permohonan PBB
3. Pendaftaran Objek Pajak baru PBB
4. Pembetulan atau mutasi PBB
5. Pencarian NPWP
6. Menghimbau Wajib Pajak NPWP
7. Pemeliharaan basis data PBB

Hingga akhir tahun 2016, KPP Pratama Teluk Betung tercatat telah memiliki jumlah Wajib Pajak yang berada di wilayah kecamatan Teluk Betung yang terdiri atas beberapa kelurahan dengan rincian :

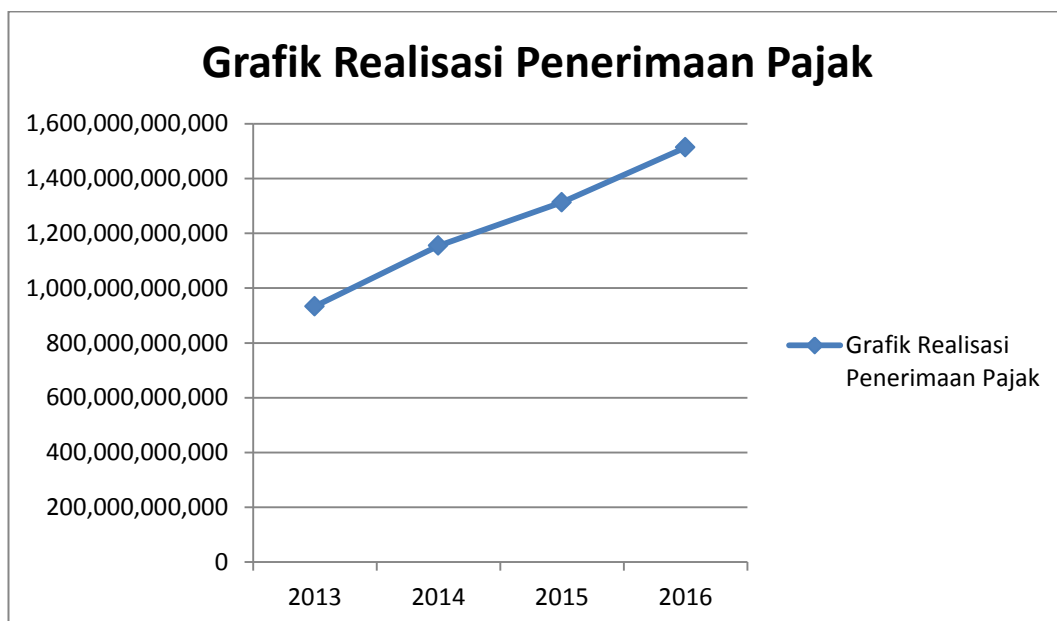
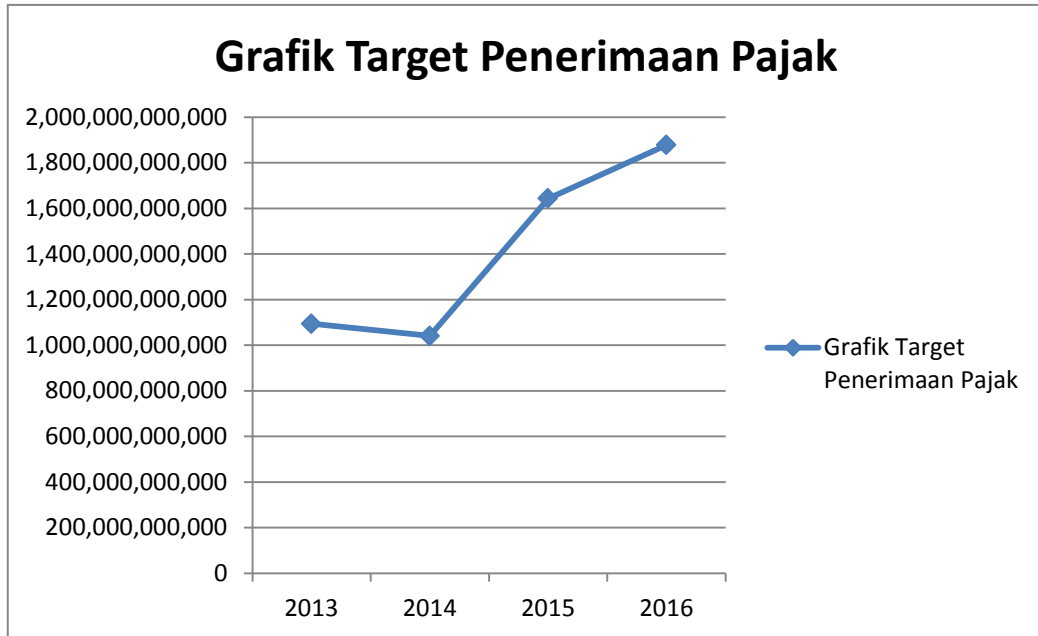
Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Teluk Betung

No.	Tahun Pajak	Wajib Pajak OP	Wajib Pajak Yang Badan
1	2013	44.178	5.591
2	2014	47.135	5.788
3	2015	51.043	6.009
4.	2016	60.246	7.670

Sumber Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Teluk Betung 2013-2016

Dengan jumlah wajib pajak tersebut, KPP Pratama Teluk Betung selalu diberikan target yang sangat tinggi dan semakin meningkat tiap tahunnya. Berikut target dan realisasi penerimaan tahun 2013 sampai tahun 2016 :

Grafik 4.3 Target & Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Teluk Betung



Grafik di atas menunjukkan bahwa Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.933.239.974.983,- dari target penerimaan pajak sebesar Rp.1.093.878.704.212,-. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.155.024.164.317,- dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.040.675.339.969,- . Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.1.313.156.694.255,- dari

target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.643.483.636.668,-. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak Rp. 1.513.170.450.890,- dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.877.679.322.520,-

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama teluk betung bersifat fluktuatif, kemudian untuk penerimaan pada tahun 2016 menunjukkan angka yang besar dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya masih banyak pihak Wajib Pajak tidak mengikuti prosedur dalam pelunasan utang pajak serta pembayaran pajak.

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Teluk Betung. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Pajak seksi Pemeriksaan dan seksi Penagihan. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan terakhir sebagai berikut :

Tabel 4.4 Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentasi
Pria	23	76,6%
Wanita	7	23,4%
Total	30	100%

Sumber : data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden laki-laki sebanyak 76,6% dan jumlahnya lebih banyak dibanding jumlah responden perempuan yang berjumlah 23,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa responden bagian pemeriksa dan penagih pajak yang terdaftar di KPP Pratama Teluk Betung lebih didominasi responden berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.5 Deskripsi Responden berdasarkan Umur

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentasi
< 25 Tahun	2	6,6%
26-30 Tahun	4	13,3%
31-35 Tahun	10	33,3%
36-40 Tahun	8	26,6%
> 40 Tahun	6	20,2%
Total	30	100%

Sumber : data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa kategori umur yang terlihat responden yang berumur < 25 tahun berjumlah 6,6% dari total responden, responden yang berusia antara 26 sampai 30 berjumlah 4 responden yaitu 13,3% dari total responden, responden yang berusia antara 31 sampai 35 tahun berjumlah 10 responden yaitu 33,3% dari total responden, responden yang berusia antara 36 sampai 40 berjumlah 8 responden yaitu 26,6% dari total responden, dan responden yang berusia diatas 40 tahun berjumlah 6 responden yaitu 20,2% dari total responden.

Tabel 4.6 Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentasi
Akademi/Diploma III	9	30%
Strata I	7	23,3%
Strata II	14	46,7%
Total	30	100%

Sumber : data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa kategori pendidikan yang terlihat responden yang berpendidikan D-3 berjumlah 9 responden yaitu 30% dari total responden, responden yang berpendidikan S-1 berjumlah 7 yaitu 23,3% dari total responden, dan terakhir responden yang berpendidikan S-2 berjumlah 14 responden yaitu 46,7% dari total responden.

4.2 Hasil Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data dan dilakukan uji statistik menggunakan SPSS 20, maka hasil penelitian yang diperoleh dari data variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel yang digunakan yaitu Pemeriksaan Pajak (X_1), Penagihan Pajak (X_2) dan Penerimaan Pajak (Y). Berikut ini disajikan deskripsi data yang telah diperoleh dan diolah menggunakan program *SPSS 20 for Windows*. Berikut merupakan hasil table statistik deskriptif berdasarkan SPSS.

Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	30	28,00	35,00	32,5333	2,34496
Penagihan Pajak	30	36,00	45,00	42,8333	2,18274
Penerimaan Pajak	30	12,00	15,00	14,0000	,90972
Valid N (listwise)	30				

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden 30. Dari 30 responden ini variabel independen. Pemeriksaan pajak memiliki nilai minimum 28,00 dan maksimum 35,00 dengan rata-rata total jawaban 32,53 dan standar deviasi 2,344. Variabel penagihan pajak memiliki nilai minimum 36,00 dan maksimum 45,00 dengan rata-rata total jawaban 42,83 dan standar deviasi 2,182. Sedangkan variabel dependen penerimaan pajak memiliki nilai minimum 12,00 dan maksimum 15,00 dengan rata-rata total jawaban 14,00 dan standar deviasi 0,909.

2) Uji Kelayakan Kuisioner

Uji kelayakan kuisioner dilakukan terhadap 30 responden, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kuisioner sebagai instrumen penelitian dapat digunakan

sebagai alat ukur variabel penelitian, uji ini menggunakan uji validitas dan realibilitas.

Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrumen. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Jika korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan total skor mempunyai signifikan dibawah 0,05 maka pertanyaan tersebut dikatakan valid dan begitupun sebaliknya (Ghozali, 2011). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pemeriksaan, penagihan dan penerimaan pajak dengan 30 sampel responden. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat analisis *Product Moment* dan perhitungannya menggunakan bantuan program *SPSS* versi 20 sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak

Variabel	Indikator	Koefisien korelasi	Nilai signifikan	Kesimpulan
(X1) Pemeriksaan Pajak	X1.1	0,796	0,000	Valid
	X1.2	0,709	0,000	Valid
	X1.3	0,694	0,000	Valid
	X1.4	0,808	0,000	Valid
	X1.5	0,611	0,000	Valid
	X1.6	0,723	0,000	Valid
	X1.7	0,625	0,000	Valid

Sumber : Data Lampiran, Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa dari semua pertanyaan untuk variabel yang memiliki subvariabel Pemeriksaan Pajak (X1) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian valid.

Dan tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel Penagihan Pajak denga 30 sampel responden.

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Penagihan Pajak

Variabel	Indikator	Koefisien korelasi	Nilai signifikan	Kesimpulan
(X2) Penagihan Pajak	X2.1	0,655	0,000	Valid
	X2.2	0,445	0,007	Valid
	X2.3	0,515	0,002	Valid
	X2.4	0,667	0,000	Valid
	X2.5	0,457	0,006	Valid
	X2.6	0,553	0,001	Valid
	X2.7	0,518	0,002	Valid
	X2.8	0,757	0,000	Valid
	X2.9	0,571	0,000	Valid

Berdasarkan tabel 4.9 diatas terlihat bahwa dari semua pertanyaan untuk variabel yang memiliki subvariabel Penagihan Pajak (X2) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian valid. Dan tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel Penerimaan Pajak denga 30 sampel responden.

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak

Variabel	Indikator	Koefisien korelasi	Nilai signifikan	Kesimpulan
(Y) Penerimaan Pajak	X3.1	0,685	0,000	Valid
	X3.2	0,752	0,000	Valid
	X3.3	0,500	0,002	Valid

Berdasarkan tabel 4.10 diatas terlihat bahwa dari semua pertanyaan untuk variabel yang memiliki subvariabel Penerimaan Pajak (Y) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian valid.

3) Uji reliabilitas

Uji reliabilitas Digunakan untuk mengukur konsistensi konstruk atau variabel penelitian. Untuk mengukur uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai koefisien Alpha lebih besar daripada 0,60 (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas keseluruhan variable dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Reliabilitas Seluruh Variabel

Variabel	Cronbach Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Pemeriksaan Pajak (X_1)	0,776	0,60	Reliabel
Penagihan Pajak (X_2)	0,735	0,60	Reliabel
Penerimaan Pajak (Y)	0,740	0,60	Reliabel

4) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Sugiyono, 2013). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian *One-sample Kolmogrov Smirnov test*. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,81388611
	Absolute	,090
Most Extreme Differences	Positive	,084
	Negative	-,090
Kolmogorov-Smirnov Z		,491
Asymp. Sig. (2-tailed)		,969

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *kolmogrov-smirnov* yang dipaparkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa dependen K-Z sebesar **0,491** dengan tingkat signifikan sebesar **0,969**. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa angka signifikan (Sig) untuk variabel dependen pada uji *kolmogrov-smirnov* diperoleh **0,969 \geq 0,05** artinya sampel terdistri busi secara normal.

5) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Metode regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal yaitu variabel

independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan no (Ghozali, 2011). Adapun hasil sebagai berikut :

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5,365	4,367		1,229	,230		
1 Pemeriksaan Pajak	,179	,069	,462	2,587	,015	,930	1,076
Penagihan Pajak	,065	,074	,157	,880	,387	,930	1,076

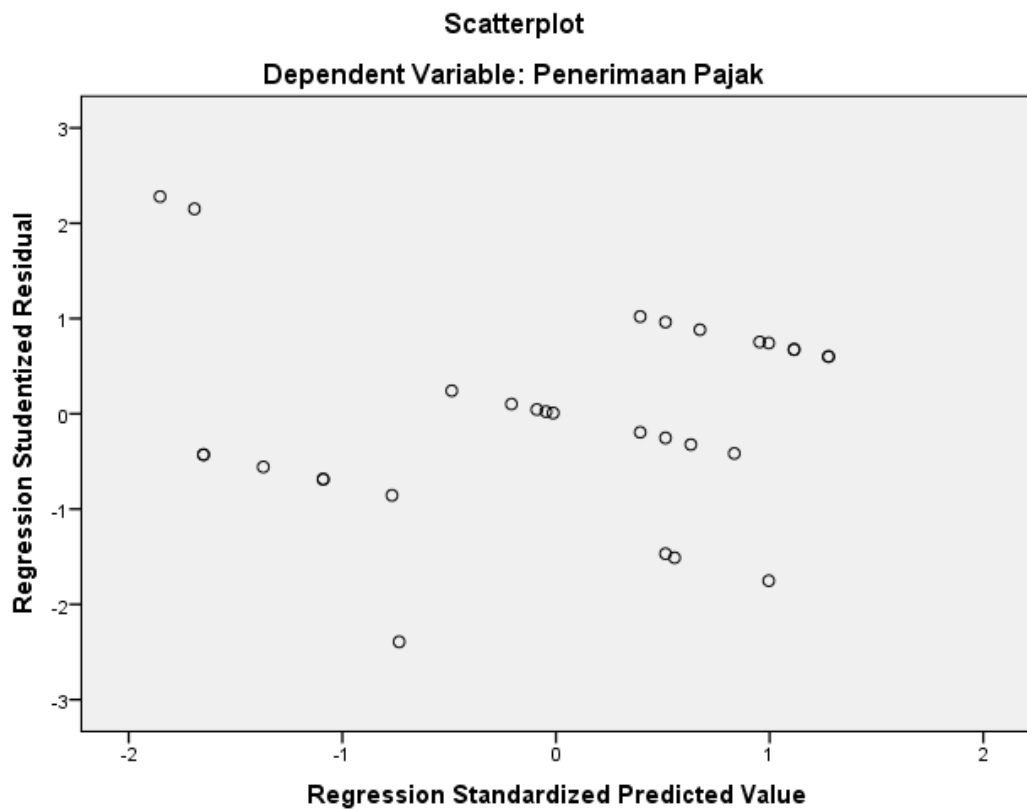
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas diketahui bahwa variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar **0,930** dan nilai VIF sebesar **1,076**, sedangkan variabel Penagihan Pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,930 dan nilai VIF sebesar **1,076**. Dari hasil data diatas diperoleh kesimpulan bahwa seluruh VIF disemua variabel penelitian lebih kecil dari **10 (< 10)**. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi.

6) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakpastian *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Adapun uji menggunakan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteoskedastisitas



Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada yang membentuk pola, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

7) Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada t-1 (Sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2011). Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau utidaknya autokorelasi salah satunya adalah Uji Durbin Watson sebagai berikut :

Hipotesis :

H_0 : Tidak terjadi Autokorelasi

H_a : Terjadi Autokorelasi

Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,447 ^a	,200	,140	,84349	1,814

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak , Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel di atas nilai Durbin-Watson sebesar **1,814** dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi **5%**, jumlah sampel **30** orang dan jumlah variabel independen (**K**) sebanyak **2**, maka tabel Durbin-Watson akan didapat nilai **du** sebesar **1,615**, nilai Durbin-Watson **1,814**. Dapat diambil kesimpulan bahwa : **du ≤ dw ≤ 4-du**. Oleh karena nilai Durbin-Watson **1,814** lebih batas atas (**du**) **1,615** (**4-du**) maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak H_0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

8) Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan linier berganda untuk menguji adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel terhadap tingkat penerimaan pajak.

Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5,365	4,367		1,229	,230		
1 Pemeriksaan Pajak	,179	,069	,462	2,587	,015	,930	1,076
Penagihan Pajak	,065	,074	,157	,880	,387	,930	1,076

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 5,365 + 0,179 X_1 + 0,065 X_2$$

Nilai koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak (X_1) terhadap Penerimaan Pajak (Y) sebesar **0,179** nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan Pemeriksaan Pajak sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan (+) Penerimaan Pajak sebesar **0,179**. Kemudian nilai koefisien variabel Penagihan Pajak (X_2) terhadap Penerimaan Pajak (Y) sebesar **0,065** nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan Penagihan Pajak sebesar 1 satuan diprediksi akan menurunkan (-) Penerimaan Pajak sebesar **0,065**.

9) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adaah antara nol dan satu. Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti semakin kecil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen atau sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjuster* R^2 dari model regresi karena R^2 bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan kedalam model, sedangkan *adjuster* R^2 dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model (Ghozali, 2011).

Tabel 4.17 Hasil Uji R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,447 ^a	,200	,140	,84349

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak , Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan tabel diatas nilai *R Square* untuk variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak diperoleh sebesar **0,200**. Hal ini berarti bahwa **20%** dari penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut, sedangkan sisanya sebesar **80%** dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam model regresi (Ghozali, 2011)

10) Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah suatu model regresi layak digunakan atau tidak melalui pengujian secara statistik. Pengujian model regresi ini dilakukan dengan menggunakan nilai *Significance Level* 0,05 atau (0 = 5%) yang akan dibandingkan dengan nilai Sig pada tabel annova. Hasil uji statistik F disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.18 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	4,790	2	2,395	3,366	,050 ^b
	Residual	19,210	27	,711		
	Total	24,000	29			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak , Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai $F_{Hitung} (3,366) \geq F_{tabel} (2,73)$ dengan nilai signifikan **0,050**. Karena nilai profitabilitasnya lebih kecil dari **0,05** ($0,050 < 0,05$) berarti secara simultan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

4.2 Pengujian Hipotesis (Uji T)

Setelah melakukan secara simultan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen dengan uji statistik t. Pengujian

dilakukan dengan menggunakan signifikansi level **0,05 (alpha = 5%)**. Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika signifikan $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 4.19 Hasil Uji Statistik T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,365	4,367		1,229	,230
	Pemeriksaan Pajak	,179	,069	,462	2,587	,015
	Penagihan Pajak	,065	,074	,157	,880	,387

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan uji statistik t diatas hasil untuk variabel Pemeriksaan Pajak (X1) menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} (2,587) > t_{tabel} (2,048)$ dengan signifikan $0,015 < 0,05$. Ini berarti secara parsial Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Kemudian untuk variabel Penagihan Pajak (X2) menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} (0,880) < t_{tabel} (2,048)$ dengan signifikan $0,387 > 0,05$.

Hipotesis	Pernyataan	Nilai	Keterangan
H ₁	Variabel Pemeriksaan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak	2,587	H ₁ diterima dan H ₀ ditolak
H ₂	Variabel Penagihan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak	0,888	H ₁ ditolak dan H ₀ diterima

4.3 Pembahasan

1) Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan (UU) yang berlaku pemeriksaan pajak disebut juga dengan pemeriksaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini disebabkan karena pegawai pajak seksi pemeriksaan kurang efektif dalam menjalankan tugasnya, sehingga SKP yang diterbitkan tidak memenuhi target yang telah ditentukan KPP.

Hasil penelitian ini sesuai dengan replikasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Primerdo (2015) meneliti Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

2) Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 (UU) No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah di sita.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penagihan Pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini disebabkan

karena kurang tegasnya bagian penagihan pajak dalam memberikan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan jumlah pajaknya atau enggan melakukan pencairan tunggakan pajaknya. Padahal adanya Penagihan melalui surat paksa, surat teguran ini diharapkan agar wajib pajak segera melunasi atau membayar utang pajaknya dan sering terjadinya tidak sampainya surat teguran dan surat paksa ke tangan Wajib Pajak karena alamat yang sulit untuk ditemukan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan replikasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahrul (2016) meneliti Analisis Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Hasilnya Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.